

BAB I

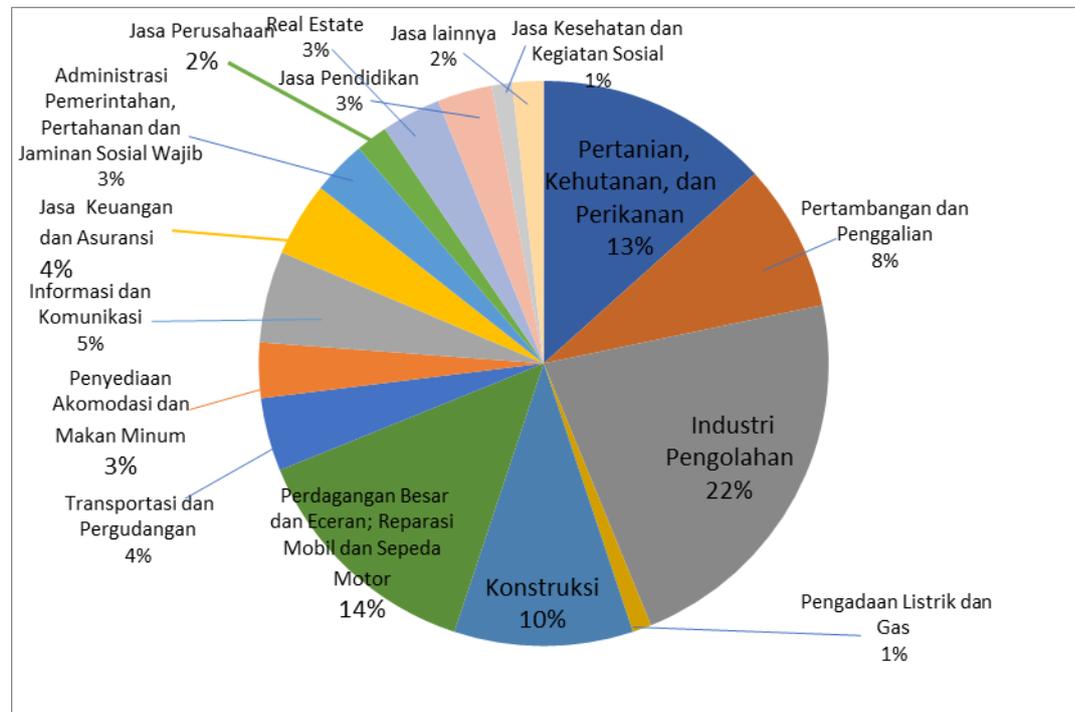
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi adalah hal yang sangat penting bagi suatu negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, termasuk Indonesia. Kegiatan ekspor menjadi faktor penentu perekonomian Indonesia, karena dengan kegiatan ekspor akan menghasilkan devisa yang akan digunakan untuk membiayai impor bahan baku dan barang modal yang diperlukan dalam proses produksi yang akan membentuk nilai tambah (Adrian sutawijaya, 2010:15). Kegiatan ekspor dapat mendorong berkembangnya kegiatan industri, dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakatnya.

Pentingnya peran kegiatan ekspor bagi Indonesia dalam meningkatkan perekonomiannya tidak terlepas dari pertumbuhan industri dalam negerinya. Kegiatan ekspor Indonesia sangat bergantung pada industri dalam Negerinya, serta pentingnya peran industri dalam meningkatkan kegiatan ekspor, maka pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan memberikan perlindungan dan membantu industri tersebut meningkatkan kinerja ekspornya. Industri juga memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan pembangunan seperti masalah pengangguran, kemiskinan, dan tidak meratanya pendapatan. Selain itu salah satu indikator pembangunan ekonomi adalah

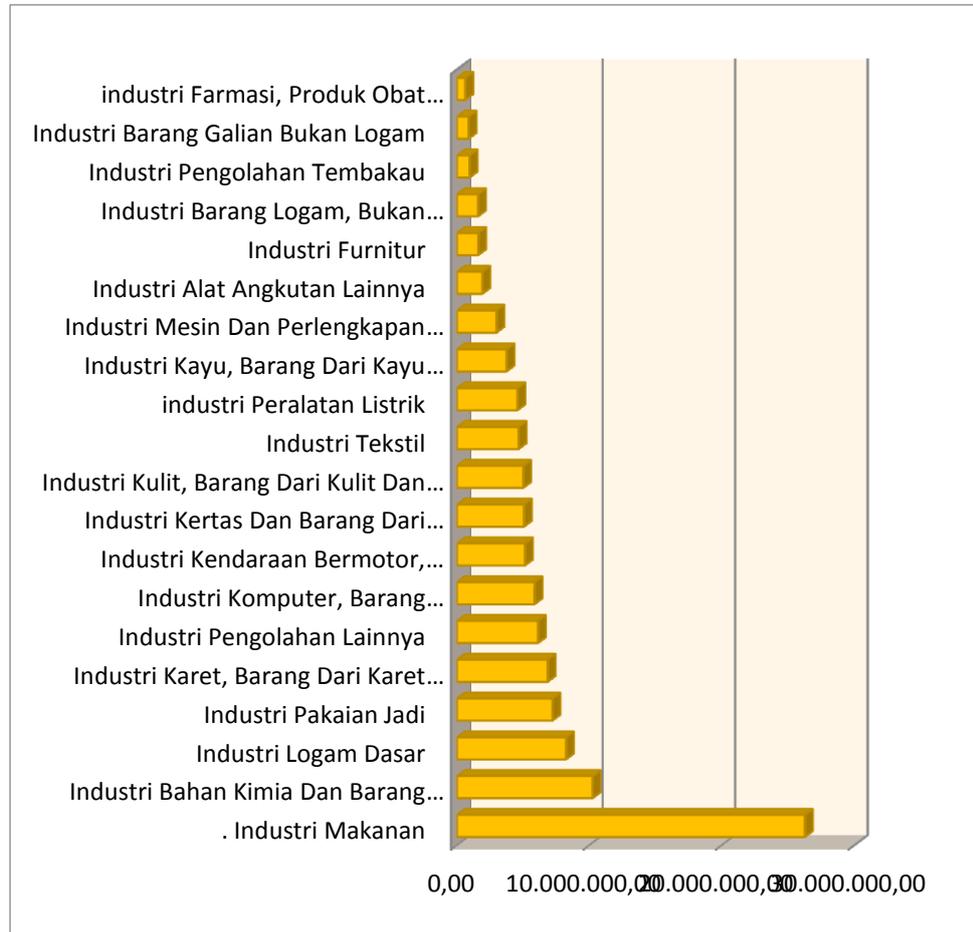
terjadinya perubahan struktur ekonomi dari sektor agraris yang menunjukkan pengalihan ke sektor industri.



Sumber: BPS (data diolah Peneliti)

Gambar 1.1
Persentase Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDB

Industri merupakan sektor utama dalam penggerak perekonomian Indonesia. Berdasarkan data BPS jumlah kontribusi Industri pengolahan terhadap PDB pada kuartal ketiga 2017 mencapai Rp.536.237.100.000. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan raihan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB tersebut membuat Indonesia menempati peringkat keempat di dunia untuk kontribusi industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Okezone, 2017). Industri pengolahan Indonesia berkontribusi sebesar 22% bagi jumlah PDB secara keseluruhan.



Sumber: Kemenperin (data diolah)

Gambar 1.2
Ekspor kelompok hasil Industri

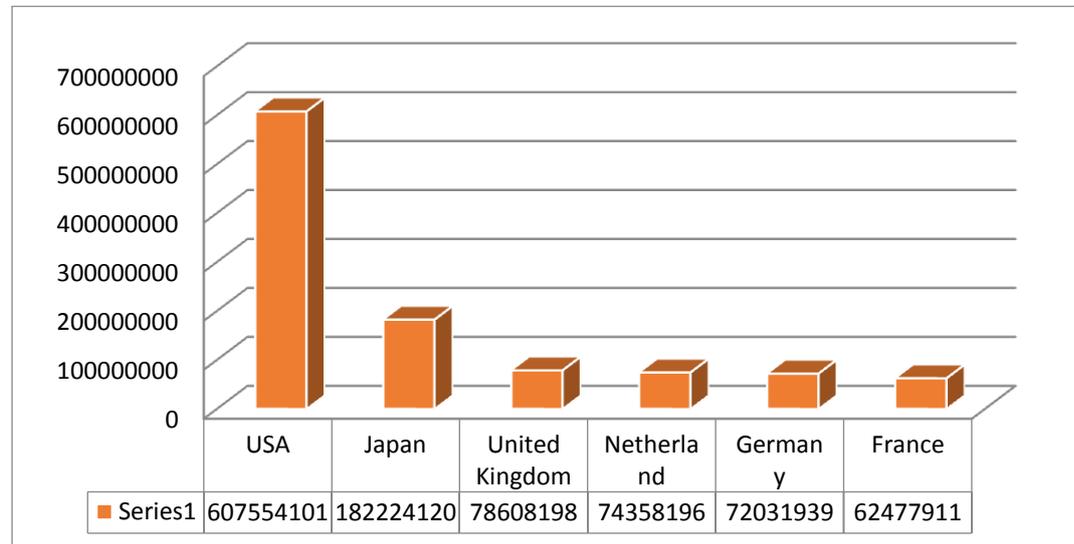
Berdasarkan data kementerian perindustrian mengenai nilai ekspor kelompok hasil industri menunjukkan bahwa pada tahun 2016 industri makanan berada di urutan pertama dengan nilai ekspor US\$ 26.274.668,600. Urutan kedua subsektor industri kimia dan barang dari bahan kimia sebesar US\$ 10.246.411,800, sedangkan untuk industri

furniture dengan nilai ekspor US\$ 1.617.746,000 berada posisi nilai ekspor kelompok hasil industri di Indonesia urutan 16 (Kemenperin,2018).

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, karena itulah struktur ekspor Indonesia lebih banyak berasal dari sumber daya alamnya yang kemudian dikelompokkan menjadi migas dan non migas. Upaya meningkatkan ekspor produk non migas, pemerintah banyak membuat kebijakan untuk melindungi industri dan membantu meningkatkan produksi untuk ekspornya. Pemerintah juga berkomitmen mendukung dengan melakukan pengembangan terhadap 10 produk utama dan potensial ekspor bagi Indonesia (Keemenperin, 2018). Produk potensial ekspor Indonesia salah satunya adalah produk hasil hutan, yang termasuk didalamnya adalah industri *furniture*.

Komoditas *furniture* menjadi salah satu komoditas unggulan dalam bidang ekspor dan juga dalam membantu kesejahteraan ekonomi Indonesia. Tahun 2016 Indonesia masuk dalam daftar 20 negara pengekspor *furniture* terbesar di dunia menurut data dari UN Comtrade. Negara yang menjadi pengekspor *furniture* terbesar tahun 2016 adalah China dengan nilai ekspor US\$ 55,516,275,577 sedangkan negara terbesar pengekspor *furniture* kedua adalah Jerman dengan nilai ekspor US\$ 11,817,918,393. Indonesia menempati posisi ke 20 dari 139 negara pengekspor *furniture* dengan nilai ekspor US\$ 1,637,749,769. Jika dibandingkan pada tahun 2014 Indonesia berada pada posisi ke 18 dengan

nilai US\$ 1,807,143,502. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi penurunan nilai ekspor.



Sumber: UN Comtrade (data diolah)

Gambar 1.3
Negara Tujuan Ekspor *Furniture* terbesar Indonesia 2016 (dalam USD)

Pasar komoditas *furniture* terbesar Indonesia adalah Amerika Serikat berdasarkan data dari UN Comtrade. Amerika menjadi negara tujuan ekspor terbesar Indonesia dengan nilai ekspor sebesar US\$607,554,101 pada tahun 2016. Terhitung sejak tahun 2006 sampai tahun 2016 pertumbuhan nilai ekspor *furniture* Indonesia di Amerika Serikat cenderung fluktuatif. Terhitung sejak tahun 2006 sampai 2016 Indonesia mengalami beberapa kali kenaikan dan penurunan nilai ekspor. Fluktuasi ekspor Indonesia di Amerika Serikat yang paling terlihat adalah pada tahun 2008 sampai 2010, dimana pada tahun 2008 nilai ekspor sebesar US\$ 526,243,594 sedang kan pada tahun 2009 terjadi penurunan

nilai ekspor yang cukup besar, yaitu dengan nilai ekspor pada tahun 2009 sebesar US\$ 457,627,668 pada tahun berikutnya 2010 terjadi peningkatan nilai ekspor kembali menjadi US\$ 530,562,218.

Indonesia hanya menggarap kurang dari 1 persen total pasar mebel global yang besarnya 440 miliar dollar AS pada 2013 (Kemenperin 2013). Hal ini menunjukkan bahwa industri *furniture* Indonesia masih memiliki daya saing dipasar global. Berdasarkan data Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), pada 2013 industri mebel menghasilkan devisa ekspor 1,81 miliar dollar AS (Kemenperin, 2013).

Tabel 1.1
Konsumsi *Furniture* Dunia, 2005-2012

Tahun	Nilai Konsumsi (miliar USD)	Pertumbuhan
2005	281.1	
2006	302.2	7.60%
2007	312.2	3.40%
2008	308.9	-1.00%
2009	290.0	-6.20%
2010	327.8	13.20%
2011	348.9	6.30%
2012	385.6	10.40%

Sumber: centre for European Policy studies (EPS) (2014), diolah

Konsumsi *Furniture* dunia tumbuh dari USD281.1, miliar pada tahun 2005 menjadi USD312.2, miliar pada tahun 2007. Sempat menurun pada saat krisis ekonomi global berlangsung. Pada tahun 2010 konsumsi *furniture* meningkat dan mencapai USD385.6, miliar pada tahun 2012. Kondisi ini tumbuh 4% pada tahun 2014 dan 3,4% pada tahun 2015 (Zamroni salim, 2017:38). Ini seharusnya menjadi peluang bagi Indonesia dalam meningkatkan ekspor *furniture*. Konsumsi *furniture* dunia mencapai

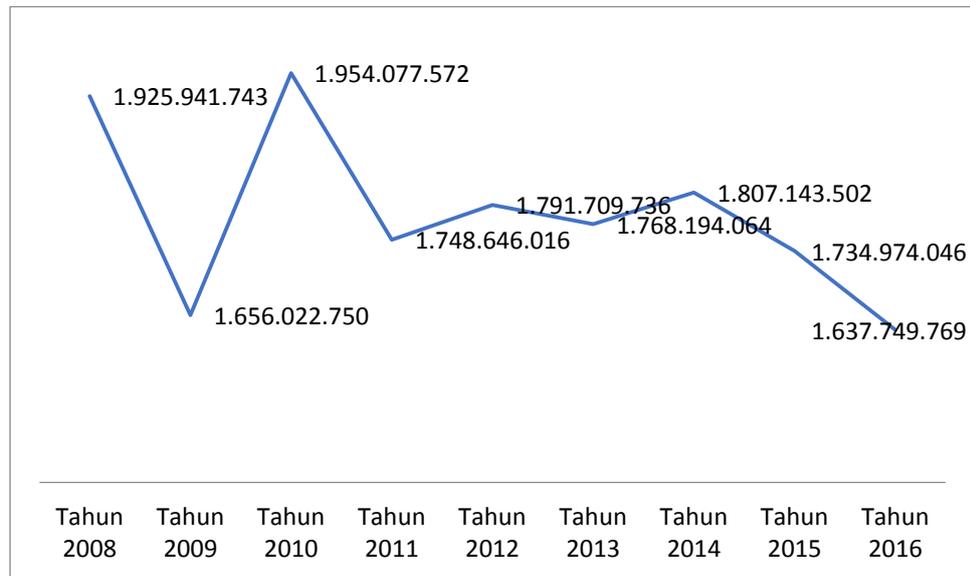
USD450 miliar pada 2014, dengan peningkatan sekitar USD 17 miliar di tahun 2013, sedangkan pada tahun 2015 tumbuh 2,8% (Zamroni salim, 2017:38). Pertumbuhan konsumsi *furniture* yang cukup bagus ini seharusnya bisa dimanfaatkan Indonesia dalam meningkatkan ekspor *furniture*nya.

Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi & Hubungan Antar Lembaga HIMKI mengatakan Terdapat beberapa persoalan yang menghambat ekspor mebel dan *furniture* Indonesia. Salah satunya adalah penerapan kewajiban Surat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) (Tribunnews, 2018). Terhambatnya ekspor menyebabkan kecilnya kontribusi ekspor *furniture* Indonesia di pasar global. Selain penerapan SVLK Abdul sobur juga mengatakan dukungan pemerintah dari sisi perbankan juga dirasa masih belum bersahabat, Bunga pinjaman bank di Indonesia masih dinilai terlalu tinggi bila dibandingkan negara-negara kompetitor (Tribunnews, 2018). Pada tahun 2009 berdasarkan sumber dari departemen kehutanan dikeluarkan peraturan tentang sistem verifikasi dan legalitas kayu yang mana peraturan tersebut mengharuskan setiap produk *furniture* yang akan diekspor harus memiliki sertifikat legalitas kayu. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah dengan alasan mendukung kelestarian lingkungan untuk mencegah tindak kejahatan yang dapat merusak lingkungan termasuk penebangan hutan tanpa izin. Dalam mendapatkan sertifikat legalitas kayu tersebut terdapat beberapa tahapan,

selain itu terdapat biaya yang cukup besar yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam mendapatkan sertifikat tersebut.

Hal ini berarti bahwa munculnya kebijakan sertifikat tersebut merupakan sebuah beban yang harus ditanggung perusahaan dalam mengekspor produk *furniture*nya, karena biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan sertifikat menjadi beban tambahan dalam produksi maupun penjualannya pada produk yang akan diekspor. Akan tetapi penerapan kebijakan sertifikat tersebut juga bisa menjadi keuntungan bagi perusahaan, karena dengan memiliki sertifikat ini harga jual produk akan lebih tinggi.

Kebijakan verifikasi legalitas kayu ini sangat membebankan para pengusaha *furniture*. Menurut pendapat Ambar Tjahjono, Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindu), menuturkan permasalahan ini terutama disebabkan oleh besarnya biaya untuk mengurus analisis dampak lingkungan yang mencapai Rp40 juta (Kemenperin, 2016). Tentu ini sangat membebankan pengusaha ataupun industri tersebut. Ambar tjahjono juga menuturkan bahwa, Biaya sertifikasi SVLK bisa mencapai Rp100 juta-Rp150 juta. Iini termasuk mahal sekali terutama bagi UKM (Kemenperin, 2016).



Sumber : diolah peneliti, 2018

Gambar 1.4
Grafik Pertumbuhan Ekspor *Furniture* Indonesia 2008-2016
(dalam USD)

Semenjak diberlakukannya kebijakan sistem verifikasi legalitas kayu pada tahun 2009 banyak menuai polemik. Jika melihat pertumbuhan ekspor *furniture* Indonesia berdasarkan Gambar 1.4 terdapat penurunan nilai ekspor pada tahun 2008 ke 2009, selain itu pertumbuhan nilai ekspor sampai tahun 2016 cenderung fluktuatif, bahkan pada tahun 2016 nilai ekspor merupakan capaian terendah selama tahun 2008 sampai 2016. Hal ini juga berdampak pada daya saing Indonesia dimana jika posisi peringkat Indonesia di daftar negara pengeksport *furniture* di dunia Indonesia merosot dari posisi 18 tahun 2014 ke 20 pada tahun 2016. Selain itu persaingan dari negara- negara pengeksport *furniture* lainnya juga membuat Indonesia semakin tertekan dalam meningkatkan daya saing industri *furniture* nya. Hal ini akan terus menjadi masalah apabila

pemerintah tidak segera mengambil keputusan untuk mendorong peningkatan daya saing industri *furniture* Indonesia.

Sekretaris Jenderal Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mengatakan bahwa nilai ekspor mebel Vietnam di tahun 2017 senilai US\$ 7 miliar, sementara Indonesia hanya US\$ 2,6 miliar (Detik, 2017). Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia belum berhasil mendorong ekspor *furniture*nya. Kita hanya US\$ 2,6 miliar, itu gabungan lagi mebel dan kerajinan, Vietnam cuma mebel saja US\$ 7 miliar, kalahnya Indonesia dengan Vietnam karena regulasi yang berbelit (Detik, 2017). Hal itu tidak menopang pertumbuhan ekspor.

Adanya peraturan verifikasi legalitas kayu kemungkinan tidak hanya berpengaruh terhadap nilai ekspor saja, volume ekspor juga akan terkena dampak dari kebijakan tersebut, selain itu jumlah produksi juga akan terdampak karena bertambahnya beban dalam hal pembiayaan atau modal bagi pengusaha *furniture*. Dampak terhadap jumlah produksi juga akan berdampak terhadap produktivitas industri *furniture* Indonesia.

Melihat daya saing *furniture* Indonesia bisa melihat dari keunggulan komparatif Indonesia dalam memproduksi *furniture* terhadap Amerika Serikat dibanding dengan keunggulan komparatif yang dimiliki negara lain dalam mengekspor komoditas *furniture* ke Amerika Serikat. dapat dilihat dan disimpulkan negara mana yang mempunyai keunggulan komparatis terbesar dari negara-negara yang mengekspor *furniture* di Amerika Serikat.

Adanya penerapan kebijakan verifikasi legalitas kayu akan memberikan beban tersendiri dalam memproduksi barang untuk ekspor, secara tidak langsung hal tersebut akan berdampak terhadap daya saing dan performa industri *furniture* Indonesia untuk mempertahankan pangsa ekspor *furniture* di pasar tujuan utama ekspor *furniture* Indonesia dengan adanya permasalahan yang dihadapi ini, maka diperlukan untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Daya Saing Industri *Furniture* Indonesia di Amerika Serikat”

B. Perumusan Masalah

Diterapkannya kebijakann sertifikasi verifikasi legalitas kayu oleh pemerintah pada tahun 2009 akan berdampak pada nilai dan volume ekspor Indonesia. Beban yang muncul adalah semakin terbebaninya industri atau para pengusaha dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi guna mendapatkan sertifikat tersebut, hal ini akan berdampak pada nilai dan volume ekspor dan berlanjut berdampak terhadap daya saing *furniture* Indonesia di pangsa ekspor utama negara tujuan. Dilain sisi dengan adanya sertifikat ini memunculkan peluang bagi industri atau pengusaha dengan meningkatnya nilai harga barang.

Permasalahan tersebut seharusnya dapat dijadikan sinyal positif sekaligus indikasi bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing komoditas ekspor *furniture*. Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana daya saing Industri *Furniture* Indonesia di Amerika Serikat?
2. Apakah Nilai tukar rupiah dan GDP Amerika Serikat mempengaruhi daya saing industri *furniture* Indonesia terhadap Amerika Serikat?
3. Bagaimana Strategi yang dapat mendukung peningkatan daya saing industri *furniture* Indonesia terhadap Amerika Serikat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dirumuskan.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisa daya saing industri *furniture* Indonesia terhadap Amerika Serikat
2. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing industri *furniture* Indonesia terhadap Amerika Serikat
3. Merumuskan strategi peningkatan daya saing industri *furniture* Indonesia terhadap Amerika Serikat

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dibagi ke dalam kegunaan teoretis dan kegunaan praktik dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh, serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan penelitian-penelitian berikutnya yang memiliki relevansi dengan masalah ini. Serta dapat menjadi bahan masukan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk pertimbangan atau saran pada kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah mengenai ekspor *Furniture*.

2. Kegunaan Praktis

a. Untuk Mahasiswa

Sebagai bahan masukan dan dapat digunakan sebagai referensi berupa hasil penelitian mengenai Analisis daya saing industri *furniture* Indonesia di Amerika Serikat.

b. Untuk Universitas Negeri Jakarta

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi khususnya mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.